

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO

No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan												
1	2	3												
A	Umum													
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda terima telah dibuat dan didapatkan.												
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.	Transaksi yang dipilih di RKDK : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Item</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Pengeluaran</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> Tidak ada transaksi penerimaan dan pengeluaran di rekening koran yang dilampirkan..		Item	Nilai	Penerimaan	-	-	Pengeluaran	-	-	Jumlah	-	-
	Item	Nilai												
Penerimaan	-	-												
Pengeluaran	-	-												
Jumlah	-	-												
B	Rekening Dana Kampanye													
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Nama Bank : BTN Status : Umum												
4.	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	a. Nama Parpol : PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO b. Nama yang tercantum di RKDK : Dana Kampanye DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo												
C	Penerimaan Dana Kampanye													
5.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK													

PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO

PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO																										
No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan																								
1	2	3																								
	Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	DLPSDK dan LPPDK telah memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang sama dan sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat penyumbang perseorangan, kelompok dan perusahaan.																								
6.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Perhitungan matematis transaksi yang tercantum dalam DLPSDK telah akurat.																								
7.	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Penerimaan DLPSD <table><tr><td>1. Sumber Parpol</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Sumber Caleg</td><td>4,971,287,500</td></tr><tr><td>3. Perorangan</td><td>-</td></tr><tr><td>4. Kelompok</td><td>-</td></tr><tr><td>5. Badan Usaha</td><td>-</td></tr><tr><td>6. Lain-lain</td><td>-</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td><u>4,971,287,500</u></td></tr></table> LPPDK <table><tr><td>1. Sumber Parpol</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Sumber Caleg</td><td>4,971,287,500</td></tr><tr><td>3. Perorangan</td><td>-</td></tr><tr><td>4. Kelompok</td><td>-</td></tr><tr><td>5. Badan Usaha</td><td>-</td></tr></table>	1. Sumber Parpol	-	2. Sumber Caleg	4,971,287,500	3. Perorangan	-	4. Kelompok	-	5. Badan Usaha	-	6. Lain-lain	-	Jumlah	<u>4,971,287,500</u>	1. Sumber Parpol	-	2. Sumber Caleg	4,971,287,500	3. Perorangan	-	4. Kelompok	-	5. Badan Usaha	-
1. Sumber Parpol	-																									
2. Sumber Caleg	4,971,287,500																									
3. Perorangan	-																									
4. Kelompok	-																									
5. Badan Usaha	-																									
6. Lain-lain	-																									
Jumlah	<u>4,971,287,500</u>																									
1. Sumber Parpol	-																									
2. Sumber Caleg	4,971,287,500																									
3. Perorangan	-																									
4. Kelompok	-																									
5. Badan Usaha	-																									

PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO

No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan
1	2	3
		6. Lain-lain Jumlah 4,971,287,500 Perbedaan -
8.	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan	Perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif telah akurat.
9.	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	Fotocopy identitas penyumbang tidak ditemukan sehingga penelusuran transaksi penerimaan ke fotocopy identitas penyumbang tidak dapat dilakukan.
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : - Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupannya seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye - Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi - Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupannya seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: - Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. - Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).	Tidak terdapat penyumbang perseorangan dalam DLPSDK.

PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO

No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan
1	2	3
	(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotocopy NPWP kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.	Tidak terdapat penyumbang kelompok dalam DLPSDK. Tidak terdapat penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha bukan pemerintah dalam DLPSDK. Pencatatan transaksi penerimaan yang dipilih : a. Jumlah : 30 item b. Nilai : 3,381,767,500 c. Transaksi tersebut telah didukung bukti penerimaan. d. Transaksi tersebut merupakan penerimaan berupa barang sehingga tidak dicatat di RKDK. Konfirmasi yang diterima a. Jawaban : 337,462,500 b. DLPSDK : 337,462,500 c. Perbedaan : - Alasan perbedaan : NIHIL

PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO

No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan																
1	2	3																
	l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	Sumbangan dalam bentuk bukan kas, telah sesuai pencatatannya dengan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.																
D	Pengeluaran Dana Kampanye																	
11.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu. Catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	DAPDK dan LPPDK telah memperlihatkan bentuk dan klasifikasi pengeluaran sesuai dengan ketentuan, yaitu : Bentuk Pengeluaran a. Kas b. Non Kas Klasifikasi Pengeluaran a. Operasi b. Modal c. Lain-lain																
12.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Perhitungan matematis transaksi yang tercantum dalam DAPDK tidak akurat. <table><tr><td>30 Sampel DK 13</td><td>3.381.767.500</td></tr><tr><td>DAPDK</td><td>-</td></tr><tr><td>Selisih</td><td><u><u>3.381.767.500</u></u></td></tr></table> DAPDK tidak mencatat seluruh transaksi pengeluaran.	30 Sampel DK 13	3.381.767.500	DAPDK	-	Selisih	<u><u>3.381.767.500</u></u>										
30 Sampel DK 13	3.381.767.500																	
DAPDK	-																	
Selisih	<u><u>3.381.767.500</u></u>																	
13.	a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Pengeluaran DAPDK <table><tr><td>1. Operasi</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Modal</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Lain-lain</td><td>-</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td><u><u>-</u></u></td></tr></table> LPPDK <table><tr><td>1. Operasi</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Modal</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Lain-lain</td><td>84.000</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td><u><u>84.000</u></u></td></tr></table> Perbedaan <u><u>(84.000)</u></u> Alasan Perbedaan : Pengeluaran lain-lain merupakan biaya bank yang tidak dicatat di DAPDK.	1. Operasi	-	2. Modal	-	3. Lain-lain	-	Jumlah	<u><u>-</u></u>	1. Operasi	-	2. Modal	-	3. Lain-lain	84.000	Jumlah	<u><u>84.000</u></u>
1. Operasi	-																	
2. Modal	-																	
3. Lain-lain	-																	
Jumlah	<u><u>-</u></u>																	
1. Operasi	-																	
2. Modal	-																	
3. Lain-lain	84.000																	
Jumlah	<u><u>84.000</u></u>																	

PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO

No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan
1	2	3
14.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: - Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK - Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi - Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. - Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: - Telusuri transaksi tersebut bukti pendukungnya dan ke RKDK. - Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti - Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): - tanggal transaksi; - nilai transaksi; - Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta - sifat dan deskripsi dari transaksi. - Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. - Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. - Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. - Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	Transaksi pengeluaran di DAPDK yang dipilih : - Jumlah : 30 item - Nilai : 3.381.767.500 - Transaksi tersebut telah didukung bukti pengeluaran. - Transaksi tersebut merupakan pengeluaran berupa barang sehingga tidak dicatat di RKDK. Transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, pencatatan nilai pengeluaran telah sesuai dengan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Tidak terdapat diskon dalam pembelian barang atau jasa. Pencatatan atas sumbangan telah patuh berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan.
E	Surat representasi dari partai politik Peserta pemilu kepada kap	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu telah didapatkan.

**AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2014**

PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN SIDOARJO

1

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		N A
2.	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
B		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	PATUH PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
5.	Ketepatan waktu pelaporan ke KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/III/2013 tanggal 7 Februari 2014; i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014.	PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	Februari 2014.	
9.	Tanggal Pembukaan RKDKP Nama bank Nama Pemilik RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.	a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.	PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
10.	Cakupan laporan pembukaan rekening khusus	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilengkapi: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU	a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL	PATUH PATUH PATUH PATUH
11.	Cakupan Laporan Awal	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. dilengkapi:	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.	PATUH PATUH PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.		PATUH
		2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU		PATUH

*) NA : Not Applicable